



MUJADI/PONTIANAK POST

**JEJAK JEMBATAN:** Kemacetan lalu lintas di simpang empat Jalan Adi Sucipto, Sungai Raya, Kubu Raya, semakin memprihatinkan. Lalu lintas arah masuk kota, harus antrean hingga nanjaknya Jembatan Kapuas 2.

## Tindaklanjut Rekomendasi LHP BPK RI

**SUNGAIRAYA**—Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI yang merekomendasikan dibentuknya Pansus terkait mekanisme pelaksanaan pemberian hibah dan bantuan sosial oleh tiga dinas di jajaran Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya yang dinilai berpotensi di salah gunakan hingga sekarang terus ditelusuri.

Wakil Ketua Pansus, Bambang Sridadi mengatakan bersama sejumlah tim pansus lainnya belum lama ini pihaknya telah melakukan kunjungan ke Jakarta bersama tim pansus untuk melakukan konsultasi dengan Mendagri RI terkait dengan Undang-Undang No.32 tahun 2012 mengenai mekanisme penyaluran dana hibah dan bantuan sosial.

"Hasil dari konsultasi tersebut menurut Mendagri banyak

indikasi penyimpangan ketika dikaitkan dengan UU No.32 tahun 2012.

Mendagri menilai ada indikasi penyimpangan dalam mekanisme penyaluran hibah dan bansos tersebut sangat berpotensi, maka dari itu tindak lanjut setelah ini kita akan melakukan rapat kerja dalam waktu dekat," ucapnya.

Berdasarkan total jumlah dana yang dikucurkan, Bambang menilai jumlahnya cukup besar yakni senilai Rp14.882.750.800 yang berpotensi disalahgunakan, karenanya dia berjanji pihaknya akan mengusut indikasi penyimpangan tersebut hingga persoalan tersebut benar-benar tuntas.

"Sementara ini indikasi penyimpangan yang ada terhadap mekanisme penyaluran hibah

dan bansos itu terletak dalam pedoman penyaluran hibah, tapi perkembangan lebih lanjut setelah rapat kerja dilakukan" jelasnya.

Politisi PDI Perjuangan ini menerangkan, dirinya bersama tim pansus lainnya akan melakukan rapat kerja dan akan memanggil ketiga SKPD yang diduga melakukan pelanggaran dalam penyaluran dana hibah dan bansos tersebut diantaranya Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Kebersihan, Dinas Pertanian dan Peternakan, Dinas Pertanian, Perkebunan dan Pertambangan yang disinyalir tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. "Selain itu kita juga akan memanggil ketua tim anggaran eksekutif juga seperti Sekda dan Kepala DPPKAD Kubu Raya," ungkapnya. (ash)